

Mobilisasi Politik Anggota XTC Indonesia Terhadap Pasangan Calon Rindu Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

Political Mobilization of XTC Indonesia Members Against Candidate Pair Missing in the 2018 West Java Governor Election

Ginar Maulana, Widya Setiabudi Sumadinata & Yusa Djuyandi

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia

Diterima: 07 Januari 2021; Direview: 10 Januari 2021; Disetujui: 30 Januari 2021

Email: ginarmaulana234@gmail.com, wsetiabudi@yahoo.com, f_yusa@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bentuk mobilisasi politik dan juga alasan dari Ormas XTC Indonesia dalam mendukung pasangan calon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Metode menggunakan pendekatan kualitatif, data dan informasi diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan metode kepustakaan (*Library Research*). Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa, mobilisasi Politik yang dilakukan oleh XTC Indonesia merupakan pengumpulan anggota / kader yang dilakukakan melalui cara satu komando untuk dikumpulkan, dan dilibatkan dalam pesta demokrasi melalui partisipasi politik dengan memobilisasi anggotanya untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Kata Kunci: Mobilisasi Politik, Partisipasi Politik, XTC Indonesia, Pemilihan Gubernur

Abstract

This paper aims to examine and understand the form of political mobilization and also the reason of the XTC Indonesia Community Organization in supporting the spouses of candidates Ridwan Kamil and Uu Ruzhanul Ulum in the West Java Governor Election in 2018. This research method uses qualitative approach, data and information obtained through observation method, interview and library method (Library Research). The results of the study concluded that, political mobilization carried out by XTC Indonesia is a gathering of members / cadres who are carried out through a command to be collected, and involved in democratic parties through political participation by mobilizing its members to support the spouse of Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum in the West Java Governor Election Year 2018.

Key Word: Political Mobilization; Political Participation; XTC Indonesia; Governor Election.

How to cite: Ginar Maulana, Widya Setiabudi Sumadinata & Yusa Djuyandi. (2021), Mobilisasi Politik Anggota XTC Indonesia Terhadap Pasangan Calon Rindu Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3(3) 1202-1209



PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan politik lokal, untuk meningkatkan partisipasi rakyat daerah, legitimasi politik dapat memberikan dampak ikatan yang kuat terhadap kepemimpinan daerah terpilih. Pilkada sebagai ruang untuk kompetisi secara adil dan antara calon yang bersaing dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih optimal, baik secara tahapan berlangsungnya pemilihan hingga proses politik pasca pemilihan.

Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyelesaian dengan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai, pemilu merupakan syarat awal dari salah satu indikator adanya demokrasi disuatu negara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara di Indonesia dalam era reformasi. Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Pada sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (representative democracy) dilaksanakannya pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar – benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu (Marijan, 2010).

Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2023 mulai ditabuh, perhelatan politik suksesi kepemimpinan Pemilukada Serentak tahun 2018 semakin memanas. Banyak calon yang masuk dalam bursa kandidat gubernur dan Wakil Gubernur pada kontestasi yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018.

Pada saat pesta demokrasi tersebut penjarangan mobilisasi politik nyatanya dilakukan secara pendekatan kultural seperti melalui etnik/ras, agama, gender, jaringan kekerabatan dan lain sebagainya. Munculnya berbagai bentuk organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), komunitas dan lain sebagainya menandakan sedang berjalannya proses demokratisasi di Indonesia.

Mobilisasi menurut (Stefano, 2007) merupakan keanekaragaman proses keterlibatan masyarakat dalam suatu usaha rekrutmen massa dengan tujuan tertentu, dan mobilisasi secara structural terjadi pada masa industrialisasi dan modernisasi. Mobilisasi dibagi menjadi 2 bentuk yaitu, mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung yang dasarnya memiliki perbedaan pada mekanisme mobilisasi yang dilakukan oleh partai maupun aktor politik. Mobilisasi langsung dilakukan dengan cara pengerahan terhadap pemilih agar melakukan tindakan politik sebagaimana yang diinginkan partai maupun aktor politik, seperti melakukan sosialisasi langsung ataupun kampanye terbuka.

Sedangkan, mobilisasi politik tidak langsung dilakukan dengan cara memengaruhi cara pandang pemilih sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik pemilih, seperti mempengaruhi pemilih melalui media internet maupun media cetak. Mobilisasi terkadang dianggap sebagai sebuah kondisi awal dari evolusi menuju partisipasi politik. Partisipasi politik dianggap sebagai kondisi ideal sebuah iklim demokrasi yang baik. pada praktiknya hal tersebut tidak selamanya berjalan seperti itu. Hasil dari kajian tentang mobilisasi dan partisipasi yang dilakukan oleh Jeffrey A. Karp dan Susan A. Banducci dalam (Karp & Banducci, 2007).

Organisasi Masyarakat menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1, yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Secara ideal, Ormas atau LSM merupakan organisasi yang muncul dari masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan (Fakih, 2000).

Berbicara mengenai politik itu sendiri memang berarti cerdas, dan bijaksana yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan suatu cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan pada akhirnya kekuasaan.



Tetapi Politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta menjadi kekuatan masa rakyat. Oleh karena itu, politik pada hakikatnya adalah bagian dari pada umat manusia yang tidak dapat dipisahkan dari keterpaduannya dengan berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Setiap manusia melakukan hal – hal yang bersifat politik serta berada dalam lingkungan yang disebut “sistem politik”. Dalam ini bahkan, pada masa lampau ketika bentuk negara belum dikenal, lingkungan masyarakat adalah merupakan sistem politik (Rudy, 2007).

Sistem tersebut dapat berperan dalam suatu kelompok atau organisasi yang dibangun oleh masyarakat dalam menunjukkan sikap politik dimasyarakat, karena hal tersebut dapat difungsikan sebagai satu kesatuan yang berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga mampu menjangkau wilayah atau masyarakat lainnya secara menyeluruh.

Saat ini terlihat pula hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan partai politik, hubungannya dinegeri ini seperti simbiosis parasitisme (satu untung yang lain dirugikan). Sesungguhnya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) harus mampu mengkonsolidasikan diri sehingga terbebas dari kepentingan politik tertentu.

Dalam jurnalnya, (Herdiansah, Randy, 2016) Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam istilah lainnya Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak – hak rakyat dalam kehidupan bernegara.

Partisipasi Civil Society, seperti lembaga swadaya masyarakat dan ormas secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada. Bentuk partisipasi politik dari Civil Society memang sangat vital, mereka sangat aktif dalam membuat agenda – agenda pendidikan politik maupun kegiatan penyediaan tempat sebagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mensukseskan Pilkada di Jawa Barat.

Partai bukan menjadi kekuatan tunggal dalam memenangkan pasangan calon di Pilkada, namun pada kenyataannya banyak kekuatan yang terlibat dalam kontestasi Pemilu untuk memenangkan pasangan calon. Kekuatan non partai terlibat dalam aktivitas mobilisasi masa untuk memenangkan pasangan calon, kekuatan non partai tersebut bisa juga dari ormas agama, ormas etnis, ormas kepemudaan, dan juga kebebasan berserikat non partai politik seperti ormas, LSM, atau sering disebut NGO (Nugroho, 2011).

Manifestasi lain dari politik mobilisasi adalah orientasi partai maupun organisasi non – pemerintah terfokus pada pemilihan pejabat – pejabat dan perebutan kekuasaan atas jabatan tertentu daripada memperkuat basis ideologi organisasinya sendiri. Proses politik dalam gaya politik mobilisasi semakin menjauhkan masyarakat ke dalam tujuan politik yang sebenarnya, yaitu demi pengaturan kehidupan bersama. Lingkaran politik menjadi lingkaran profesi yang menghidupi para politikus dalam arti yang sebenar – benarnya. Mereka hidup dari proses politik mobilisasi tanpa memiliki sumber – sumber keuangan lain diluar jabatan – jabatan politik yang disandang itu.

Di Kota Bandung terdapat salah satu kelompok yang bertransformasi menjadi sebuah organisasi yaitu XTC Indonesia yang telah legal secara hukum dan mengadopsi paham nasionalis seperti kebanyakan ormas lainnya yang ada di Indonesia. XTC terlebih dahulu menjadi komunitas motor yang bernaung di Ikatan Motor Indonesia (IMI) karena aktif di bidang otomotif. Melalui Musyawarah Nasional pertama XTC Indonesia telah sah karena telah terdaftar dalam akta “Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan XTC Indonesia” yang dibuat PPAT tertanggal 06 November 2019 No: AHU-1005.AH.02.01.TAHUN 2010 dan tercantum dalam Lamiran Keputusan Dirjen KEMENKUMHAM pada tanggal 07 November 2019.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis termotivasi untuk meneliti ormas XTC yang sekarang statusnya Organisasi Massa Non - Partisan yang turut serta ikut berpartisipasi dengan memberikan dukungan dalam bentuk mobilisasi massa terhadap pasangan calon Ridwan Kamil

bersama Uu Ruzhanul Ulum pada saat Pilgub tahun 2018 di Jawa Barat, alasan perubahan atau masa transformasi.

Peneliti mengambil tema penelitian Mobilisasi Politik Anggota XTC Indonesia Dalam Mendorong Partisipasi Politik Terhadap Pasangan Calon Rindu Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dengan objek penelitiannya yaitu Ormas XTC berlokasi di Kota Bandung. karena terdapat suatu perbedaan dengan penelitian lainnya, diantaranya bahwa Ormas XTC Indonesia sebelum rampung menjadi sebuah organisasi, adalah sekumpulan komunitas motor ternama di Kota Bandung yang terkenal dengan jam terbangnya sebagai gangster yang awam terhadap hal – hal berbau politik maupun pemerintahan. Dan hingga saat Pilkada Tahun 2018 terlaksana, masih ada pro dan kontra dari sebagian anggota atas keterlibatan XTC Indonesia dalam mengikuti pesta demokrasi tersebut.

Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2023 mulai ditabuh, perhelatan politik suksesi kepemimpinan Pemilukada Serentak tahun 2018 semakin memanas. Banyak calon yang masuk dalam bursa kandidat gubernur dan Wakil Gubernur pada kontestasi yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018. Dilansir dari (jawapos.com, 2018) Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diangkat menjadi dewan kehormatan XTC Indonesia.

Hal ini bila dipandang secara politis menunjukkan bahwa XTC Indonesia telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Ridwan Kamil bersama Uu Ruzhanul Ulum atau disingkat Rindu dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Pengangkatan (Ridwan Kamil) sebagai anggota kehormatan diberikan atas dukungan positif kang emil terhadap program – program yang dijalankan XTC. Dijelaskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat XTC Indonesia, Wanwan Suwandi di sela HUT XTC Ke – 35 Tahun di Stadion GBLA, Bandung. Hal tersebut berlanjut pada saat Pasangan Calon Rindu membuka acara rapat bersama keluarga besar XTC Indonesia di Bandung, Sabtu (24/3/2018) pagi. Ridwan mengatakan, dukungan dari XTC menjadi modal penting bagi pasangan Ridwan-Uu agar mampu menggaet suara pemilih milenial.

Berikut ini adalah daftar calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2018:

Tabel 1.1

Tabel Daftar Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

No. Urut Pendaftaran	Pasangan Calon
1	Gubernur : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.Ud. Wakil Gubernur : H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E.
2	Gubernur : H. Deddy Mizwar, S.E., M.Ipol. Wakil Gubernur : H. Dedi Mulyadi, S.H.
3	Gubernur : Mayjen TNI (Purn) H. Sudradat, M.Pa. Wakil Gubernur : H. Ahmad Syaikh
4	Gubernur : Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M. Wakil Gubernur : Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N

Dari hasil pemaparan di atas penulis mengambil dua contoh penulisan terdahulu diantaranya yang berjudul “Strategi Mobilisasi Politik pada Pemilu 2019” di Indonesia, ditulis oleh (Dewi, Mufarikhin, Rohmaniah, 2019), didalam tulisan ini menjelaskan Pada saat Pemilu 2019b terdapat empat macam strategi dalam memobilisasi massa, strategi tersebut yaitu : penggunaan politik identitas dimana agama Islam digunakan untuk memobilisasi massa sehingga terbentuk dua kubu yang berbeda, melalui media komunikasi dengan media televisi melalui penyiaran berita dan iklan serta menggunakan media sosial, melalui *money politic* dengan menyiapkan sejumlah uang yang disebar oleh kelompok kepentingan ataupun personal, dan melalui *public figure* lainnya. Muncul pola baru dalam mobilisasi politik, dengan penggunaan politik identitas yang kemudian disebar luaskan melalui media media sosial.

Hal tersebut menjadi suatu metode yang sangat jitu untuk menggali dukungan dari masyarakat, isu-isu provokatif yang digulirkan dengan mudah menggugah emosi masyarakat,



penyebaran berita hoax di media sosial tidak dapat terkendali terutama mengenai isu politik dan isu Sara.

Selanjutnya, ada penelitian yang mengangkat judul “Partisipasi Politik Organisasi Massa Dalam Pemilihan Kepala Daerah” yang ditulis oleh (Rohmah, 2019) Organisasi Massa memiliki peran yang signifikan dalam Pilkada. Peran tersebut di antaranya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama anggota dari Organisasi Massa tersebut. Diharapkan dengan demikian masyarakat dapat melek politik dan dapat memilih Pemimpin Daerah serta wakil rakyat secara benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Organisasi Massa juga dapat melibatkan diri dalam pemantauan, dan pengawasan Pilkada. Juga diharapkan dapat menindaklanjutinya dengan pelaporan kepada institusi yang memiliki kewenangan menerima laporan tersebut. Jika hal ini dilakukan oleh banyak Organisasi Massa, maka kecurangan-kecurangan dalam Pilkada dapat diatasi dengan cepat dan transparan. Dengan demikian, Pemimpin Daerah dan wakil rakyat yang terpilih pun benar-benar pilihan rakyat dan dapat menampung aspirasi rakyat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Data dan informasi diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan metode kepustakaan. Dengan jenis penelitian deskriptif. Moleong berpendapat bahwa pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan dimana data – data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar dan bukan angka, data – data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumentasi pribadi, memo beserta bentuk dokumentasi lainnya (Moleong, 2005).

Metode kualitatif dianggap tepat untuk mengeksplorasi Partisipasi melalui bentuk mobilisasi dari XTC Indonesia dalam kontestasi politik pemilihan gubernur tahun 2018. Penelitian ini lebih bersifat memahami fenomena, dimana pimpinan dan kader organisasi berperan sebagai objek yang mencoba memberikan makna dan penafsiran dari apa yang peneliti lihat di lapangan.

Data-data dan argumentasi yang dibangun dalam penulisan ini bersumber pada literatur, seperti buku-buku yang berkaitan dengan partisipasi politik dan mobilisasi politik, bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis dan sumber-sumber lain yang menunjang sumber data primer seperti dokumentasi, skripsi, tesis, jurnal dan karya ilmiah lainnya ataupun dari internet, website atau blog dan juga pada informan di lapangan melalui wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi masyarakat seperti XTC Indonesia tentu memiliki pengaruh dalam memobilisasi massa dalam sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Massa yang dimiliki oleh XTC Indonesia khususnya di Jawa Barat dimanfaatkan dalam proses – proses politik praktis.

Seperti yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat Tahun 2018, dengan kekuatan massa yang dimilikinya ini dapat digunakan sebagai mesin – mesin politik yang efektif dalam kontestasi politik. Maka XTC Indonesia sebagai Organisasi Masyarakat yang memiliki basis massa cukup banyak dapat berperan besar dalam demokrasi yang terjadi pada saat Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Dengan memanfaatkan momen pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2018 ini XTC Indonesia melalui Ketua Umum sebelumnya Ivan Rivky Kabira mendekati diri kepada salah satu pasangan calon yaitu Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum demi kepentingan internal organisasi guna mengangkat nama XTC Indonesia dan menunjukkan kredibilitas Ormas XTC Indonesia dalam bentuk mobilisasi massa. Sedangkan keberpihakan Ivan Rivky Kabira sendiri terhadap Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dengan tujuan untuk menaikkan elektabilitasnya sebagai pimpinan suatu organisasi massa dalam Pemilu mendatang.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari XTC Indonesia khususnya di Jawa Barat mendukung pasangan calon Rindu, yang pertama adalah potensi yang dimiliki pasangan Ridwan

Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sangatlah mendukung kemajuan organisasi melalui program-program pemerintah yang kreatif dan dapat membuat sumber daya manusia internal atau anggota XTC Indonesia berkembang, karena sebelumnya Ridwan Kamil atau yang akrab disapa kang emil adalah Wali Kota Bandung. Dalam puncak karirnya memimpin Kota Bandung, kang emil banyak memberikan kontribusi perubahan yang sangat signifikan terhadap kota Bandung dimulai dari perbaikan infrastruktur, pengembangan daya pikir masyarakat melalui program-program pemerintahannya.

Faktor tersebut merupakan alasan kuat yang dijadikan XTC Indonesia untuk memobilisasikan kader dan partisipasinya dalam mendukung pasangan calon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menjawab menggunakan teori partisipasi mobilisasi politik dari Samuel P. Huntington, Teori Huntington berpendapat bahwa seseorang dalam berpartisipasi dapat di gerakan oleh pihak lain atau di mobilisasikan massanya.

Selanjutnya, pada saat Pasangan Calon Rindu membuka acara rapat bersama keluarga besar XTC Indonesia di Bandung, Sabtu (24/3/2018) pagi. Ridwan mengatakan, dukungan dari XTC menjadi modal penting bagi pasangan Ridwan-Uu agar mampu menggaet suara pemilih milenial. Pada kesempatan itu pula XTC Indonesia melakukan mobilisasi massa menggunakan cara persuasif, represif dan rangsangan materi.

XTC Indonesia dalam tehnik mobilisasi politiknya memanfaatkan sistem yang dipegang teguh oleh seluruh anggota dan kader yaitu sistem intruksi satu komando yaitu komando Ketua Umum. Dalam hal ini sistem satu komando dapat diartikan sebagai sistem yang menerapkan adanya intruksi yang diberikan oleh elit XTC Indonesia kepada seluruh jajaran tingkat pimpinan kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat hingga Pengurus Anak Cabang yang wajib di patuhi dan dijalankan oleh kader XTC Indonesia.

Seperti yang diungkapkan oleh Huntington, partisipasi mobilisasi politik adalah partisipasi yang timbul dan muncul karena adanya tekanan dan pengorganisasian oleh seseorang terhadap masyarakat tersebut untuk ikut serta dalam proses politik (Nuno, 2007). Mobilisasi yang dilakukan oleh XTC Indonesia sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan karena adanya dorongan dari pihak lain.

Peran elit sangat penting dalam mobilisasi massanya karena partisipasi ini muncul ketika adanya intruksi atau dorongan dari elit. Partisipasi politik yang ditemukan adalah adanya dorongan dari elit kepada individu-individu untuk memilih sesuai dengan kehendak organisasi. Sosok elit yang sangat berpengaruh di XTC Indonesia sendiri pada saat tahun 2018 bertepatan dengan Pemilihan Gubernur saat itu adalah Ivan Rivky Kabira yang akrab disapa Masbon selaku Ketua Umum.

Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, diantaranya dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiarjo, 2008).

Menurut (Almond, Gabriel A. , Verba, 1984) ada dua bentuk partisipasi, pertama adalah partisipasi aktif yang berarti kegiatan berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output.

Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena masyarakat beranggapan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang telah dicita - citakan. Terdapat beberapa sudut pandang masyarakat yang dalam hal ini salah satunya adalah partisipasi dari pemilih pemula.

Salah satu kegiatan dalam partisipasi politik meliputi hak suara, berarti kegiatan berpartisipasi secara aktif adalah kegiatan yang memiliki kecenderungan dalam proses *input* dan *output* politik. Huntington dan Nelson (1994) memberikan keterangan mengenai kondisi partisipasi politik yang bergerak pada suatu garis spektrum yaitu : 1) Partisipasi otonom atau mandiri merupakan bentuk partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat, pada bentuk ini keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan tentang ide dan suatu konsep pada pemerintah, mendirikan partai politik serta menjadi kelompok penekan bagi pemerintah guna



memperoleh hak pada pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya; 2) Partisipasi mobilisasi yang lebih mengutamakan dukungan masyarakat terhadap implemementasi program, baik politik, ekonomi maupun sosial. Artinya, menghindari partisipasi yang dimobilisasi dengan manipulasi dan tekanan dari berbagai pihak, hal tersebut sangat signifikan terhadap individu atau kelompok, Loekman Soetrisno menyebutkan, "kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah."

Partisipasi politik pada dasarnya dapat berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, kegiatan partisipasi juga diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dalam pelaksanaannya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami intrik politik yang membuat masyarakat ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda kurang baik karena dapat ditafsirkan bahwabanyak masyarakat yang tidak peduli terhadap masalah negara.

Dalam bukunya (Budiardjo, 1981) mempunyai pandangan tentang sikap elit-elit politik terhadap partisipasi politik di dalam setiap masyarakat, mungkin merupakan satu-satunya faktor yang paling menentukan yang mempengaruhi sifat dari pada partisipasi dalam masyarakat bersangkutan. Partisipasi yang dikerahkan (mobilized participation) hanya terjadi apabila elit-elit politik mengadakan ikhtiar untuk melibatkan massa rakyat ke dalam kegiatan politik.

Dalam proses menuju mobilisasi Ketua Umum XTC Indonesia Masbon berkoordinasi dengan elit-elit organisasi XTC Indonesia lainnya, perjalanan elit XTC Indonesia menggunakan sistem yang disebut sistem satu komando untuk menginstruksikan kepada kader yang berada di struktur paling bawah. Selain mobilisasi massa, XTC Indonesia juga mengajak masyarakat umum untuk berpartisipasi dengan memberikan dukungan terhadap pasangan Rindu secara praktik XTC Indonesia membentuk tim satgas khusus yang bertugas untuk mengamankan suara – suara dari setiap TPS, selain itu tim satgas dibentuk guna mengawasi apabila adanya kecurangan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Organisasi-organisasi non-partisan berbasis massa seperti ini selalu menjadi tujuan bagi partai atau pasangan calon untuk membentuk jaringan politik demi kepentingan pemilihan. Hal inilah yang juga terjadi di pemilihan gubernur jawa barat. Pasangan calon menggunakan basis massa dari XTC Indonesia sebagai sumber mobilisasi suara. Melihat XTC Indonesia sebagai organisasi non-partisan dan juga memiliki basis massa yang cukup banyak di Jawa Barat khususnya Kota Bandung.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa mobilisasi massa yang dilakukan oleh XTC Indonesia dalam Pemilihan Gubernur tahun 2018 terhadap pasangan calon Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum Terdapat beberapa faktor yang mendasari XTC Indonesia khususnya di Jawa Barat mendukung pasangan calon Rindu, yang pertama adalah potensi yang dimiliki pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sangatlah mendukung kemajuan organisasi melalui program – program pemerintah yang kreatif dan dapat membuat sumber daya manusia internal atau anggota XTC Indonesia berkembang, karena sebelumnya Ridwan Kamil atau yang akrab disapa kang emil adalah Wali Kota Bandung. Dalam puncak karirnya memimpin Kota Bandung, kang emil banyak memberikan kontribusi perubahan yang sangat signifikan terhadap kota bandung dimulai dari perbaikan infrastruktur, pengembangan daya pikir masyarakat melalui program – program pemerintahnya. Faktor tersebut merupakan alasan kuat yang dijadikan XTC Indonesia untuk memobilisasikan kader dan partisipasinya dalam mendukung pasangan calon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Selanjutnya, penulis berpendapat agar XTC Indonesia melakukan pendidikan politik terhadap anggota / kader guna memperluas wawasan tentang dasar dasar politik agar sumber daya manusia dalam organisasi XTC Indonesia. Hal tersebut bermaksud untuk mempersiapkan seluruh kader bahkan pimpinan atau elit organisasi menghadapi pesta demokrasi pada saat Pemilu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G.A., & Verba, S. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Budiardjo, M. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik*. Gramedia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Herdiansah A.G, Randy. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal*, 1(1), 50-60
- jawapos.com. (2018). *Geng Motor Jabar Dukung Rindu*. 12 Februari. <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/19/02/2018/geng-motor-jabar-dukung-rindu/> (diakses pada tanggal 26 Desember 2020)
- Karp, J.A.; Bancudcci, S.A. (2007). *Party Mobilization And Political Participation In New And Old Democracies*. SAGE Publications.
- Lexy. J. M. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fakih, M. (2000). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nevy Rusmarina Dewi, Mufarikhin, D. A. R. (2019). Strategi Mobilisasi Politik pada Pemilu 2019” di Indonesia. *Pemikiran Politik Islam*, 2.
- Nugroho, K. (2011). Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi Politik Elektoral. 24(2), 202–214.
- Nuno, S. (2007). Latino Mobilization and Vote Choice in the 2000 Presidential Election. *American Politics Research*, 2(1), 61–66.
- Rudy, M. (2007). *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Rohmah, S.N. (2019). *Partisipasi Politik Organisasi Massa Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Hukum Dan Keadilan, 3.
- Stefano, B. (2007). *The Political Mobilization Pf The European Left, 1860 - 1980 : The Class Cleavage*. In Fatma (Digital Pr, p. 10). Cambridge University Press.